

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada saat ini Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berusaha untuk memajukan pertumbuhan ekonomi di setiap provinsi yang ada di Indonesia dengan maksud tujuan untuk mensejahterakan seluruh lapisan penduduk di Indonesia yang berada di masing-masing Provinsi dengan melakukan pemeratan pembangunan. Pembangunan ini diharapkan dapat menyentuh dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, baik ditingkat pusat, tingkat daerah, kabupaten dan bahkan sampai ke pelosok – pelosok desa.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Mudrajad, 2004). Terjadinya pembangunan di suatu negara atau daerah ditandai dengan beberapa aktivitas perekonomian seperti meningkatnya produktivitas dan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk sehingga terjadi perbaikan tingkat kesejahteraan.

Pembangunan nasional yang sedang dilakukan saat ini bertujuan untuk mensejahterakan Bangsa Indonesia, dimana hasil dari pembangunan dapat disentuh dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, baik tingkat pusat, tingkat daerah, kabupaten dan bahkan sampai ke pelosok – pelosok desa. Hal tersebut sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan oleh Tap. MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Tahun 1999-2004 (GBHN Bab 1 (Pendahuluan)) yaitu :

“Pembangunan merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan global.”

Demikian pula sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam GBHN 1999 yaitu :

“ Terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat Indonesia yang demikian itu harus didukung oleh manusia Indonesia yang mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin.”

Menurut (Mudrajad 2004) ada tiga masalah pokok yang harus diperhatikan dalam mengukur pembangunan suatu negara atau daerah, yaitu :

1. Apa yang terjadi pada tingkat kemiskinan,
2. Apa yang terjadi terhadap pengangguran,
3. Apa yang terjadi terhadap ketimpangan dalam berbagai bidang.

Ketiga masalah .pokok tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan antara satu dan lainnya. Tingginya tingkat kemiskinan dikarenakan banyaknya pengangguran yang kemudian berdampak pada ketimpangan dalam berbagai bidang. Dengan kata lain, bila salah satu dari tiga hal tersebut mengalami gangguan atau guncangan, maka dua hal yang lainnya juga mengalami dampaknya.

Selain itu, timbulnya kemiskinan juga dikarenakan oleh rendahnya kemampuan masyarakat mengakses lapangan kerja dan sedikitnya peluang masyarakat untuk mendapatkan kesempatan kerja. Kondisi ini diperburuk oleh banyaknya tenaga kerja yang di-PHK akibat para pengusaha dalam negeri maupun luar negeri gulung tikar dan melarikan modalnya ke luar negeri. Untuk mengatasi keadaan tersebut, pemerintah

dituntut untuk memikirkan berbagai tindakan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, mengatasi masalah pertumbuhan ekonomi, kemiskinan serta pengangguran.

Kebijakan tentang otonomi daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) , yang dikukuhkan dengan Undang-undang (UU) telah membawa konsekuensi tersendiri bagi daerah untuk bisa melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan harapan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah. Kebijakan tersebut dicanangkan oleh pemerintah melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang direvisi dengan UU Nomor 33 Tahun 2004.

Otonomi daerah berlaku di Indonesia berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 ( direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 ) tentang pemerintahan Daerah memisahkan dengan tegas antara fungsi Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif). Berdasarkan pembedaan fungsi tersebut, menunjukkan bahwa antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan (Halim & Abdullah,2006). Pada Pemerintahan, peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif, dan publik.

Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Otonomi Daerah, yang dilaksanakan secara efektif mulai tanggal 1 Januari 2002, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintah yang sesungguhnya. Tujuan otonomi adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan , dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Adapun yang mendorong diberlakukannya otonomi daerah adalah dikarenakan tidak meratanya

pembangunan yang berjalan selama ini sehingga menyebabkan ketimpangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Desentralisasi dan otonomi daerah pada dasarnya sejalan dengan prinsip demokrasi yang menghargai keberagaman daerah berdasarkan tingkat kemajuan ekonomi secara makro, kekayaan sumber daya alam, dan kualitas sumber daya manusia pada masing-masing provinsi.

Sebelum adanya otonomi daerah, setiap provinsi dan kabupaten hanya mengandalkan anggaran dari pemerintah pusat untuk menunjang aktivitas kegiatan daerah selain mengandalkan dari sektor pertanian atau industri yang bergerak di masing-masing provinsi. Setelah adanya otonomi daerah. Setelah adanya otonomi daerah, provinsi dan kabupaten diberi kewenangan untuk menjalankan kegiatan ekonominya secara mandiri dengan pantauan Pemerintah Pusat. Dengan adanya otonomi daerah, tiap provinsi dapat mengurangi ketergantungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, serta untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam mengelola pembangunan sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing.

Untuk mencapai pembangunan daerah yang optimal guna terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran, kegiatan pembangunan daerah harus diutamakan untuk daerah yang relatif tertinggal. Pembangunan dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat.

Untuk mewujudkan pembangunan daerah yang optimal tidaklah semudah yang diperkirakan, karena perlu adanya rencana-rencana yang matang, perjuangan yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah pembuat kebijakan dan pelaku pembangunan, termasuk didalamnya para penyelenggara negara agar pembangunan nasional berjalan dengan berkelanjutan dan berkesinambungan.

Maka dari itu, saat ini Bangsa Indonesia diminta untuk mulai mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional tersebut dengan memulai pembangunan daerah yang diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakan prakarsa serta aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab.

Dalam menyelenggarakan pembangunan daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka strategi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berencana, bertahap dan kesinambungan menuntut adanya bobot, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Untuk itu dibutuhkan adanya Keuangan daerah, khususnya penerimaan yang dihimpun dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdapat di setiap daerah, yaitu berupa hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan lain-lain usaha daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber dari pembiayaan daerah. Oleh karena itu, kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Di samping itu semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar PAD. Hal ini karena PAD lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar PAD. Ini di karenakan PAD dapat di fungsikan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya.

Dengan ditetapkannya UU Nomor 22 Tahun 1999, pemerintah di daerah mendapat kewenangan “riil” yang lebih besar dalam mengatur dirinya sendiri. Hal ini menimbulkan peningkatan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintah ( penyediaan barang publik dan

pembangunan ekonomi ) di tingkat daerah yang sangat besar, khususnya pada bidang pendidikan yang merupakan unsur esensial dalam pembangunan daerah dan telah menjadi salah satu bagian utama kebutuhan penduduk. Namun, kemampuan daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat dikatakan sangat terbatas, mengingat peranan Pendapatan Asli daerah (PAD) masih rendah dalam penerimaan APBD daerah kota/kabupaten dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) serta kemampuan manajemen sektor pendidikan di tingkat daerah masih sangat terbatas.

Secara umum kemampuan keuangan dipandang sebagai tolak ukur atau kriteria kemampuan suatu daerah menyelenggarakan tugas-tugas pembangunannya. Namun pengumpulan PAD itu sendiri tidak datang begitu saja dengan mudah dan cepat didapat. Dibutuhkan suatu penggalian-penggalian potensi daerah yang dapat meningkatkan jumlah keuangan daerah terlebih lagi PAD . Untuk mencapai hal tersebut tentu saja di butuhkan usaha dan kemauan yang lebih dari masyarakat dan pemerintah sebagai penggerak.

Meskipun usaha yang telah dilakukan sudah mencapai titik optimal belum tentu dapat membuahkan hasil yang maksimal, penerimaan PAD dianggap masih belum cukup untuk memenuhi pembangunan yang dijalankan. Hal ini belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang diharapkan bahwa otonomi secara keseluruhan masih belum berjalan dengan baik.

Hal ini menyebabkan banyaknya urusan otonomi yang masih dapat dilaksanakan akan tetapi masih membutuhkan bantuan sebagaimana Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dapat disimpulkan bahwa pemerintah masih mendapat tugas untuk membina daerah. Selain itu hal ini dapat juga berarti adanya indikator ketergantungan dari pemerintah daerah terhadap pemberian DAU dan DAK serta bantuan dari pemerintah pusat.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Estimasi untuk perhitungan anggaran DAU dihitung berdasarkan UU No. 25 Tahun 1999 dan PP No. 104 Tahun 2000.

Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan untuk membantu pendanaan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan, atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) , dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping dana perimbangan tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pembiayaan dan pendapatan lain-lain.

Namun dalam praktiknya, transfer dari Pemerintah Pusat merupakan pendanaan utama Pemerintah Daerah untuk membiayai operasional daerah, yang oleh Pemerintah Daerah “dilaporkan” di perhitungan anggaran. Tujuan transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri (Maimunah,2006). Dalam hal ini diharapkan bahwa di masa yang akan datang tidak lagi bergantung pada bantuan dari Pemerintah Pusat. Di masa datang seluruh daerah harus dapat mandiri dalam menggali PAD dan mengatur manajemennya.

Dapat di simpulkan bahwa PAD,DAU dan DAK merupakan komponen inti dari keuangan daerah yang akan membiayai seluruh operasional pembangunan yang ada

disuatu daerah. Dari pembiayaan tersebut kita akan memperoleh output yaitu Pertumbuhan Ekonomi (PDRB).

**Tabel 1.1**

NO	KABUPATEN/KOTA	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (Ribuan Rupiah)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	BOYOLALI	96.737.567	127.725.207	160.752.450	227.516.496	221.873.999
2	KARANGANYAR	104.080.774	116.706.893	161.715.928	215.298.860	181.061.011
3	KLATEN	72.290.994	84.755.835	115.441.420	177.923.444	156.097.966
4	SRAGEN	94.519.000	127.695.844	146.721.552	254.392.450	195.290.956
5	SUKOHARJO	96.166.807	164.954.319	192.971.720	264.814.414	235.933.524
6	SURAKARTA	181.096.817	231.672.101	298.400.847	335.660.207	341.533.937
7	WONOGIRI	77.141.691	101.421.893	111.592.606	182.149.063	174.557.497

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2011-2015

Sebagaimana kita lihat diatas adalah perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Eks-Karisidenan Surakarta antara tahun 2011 hingga 2014, dapat terlihat bahwa nilai Pendapatan Asli Daerah dominan naik setiap tahunnya, namun bahwa pada tahun 2015 seluruh PAD di Eks-Karisidenan Surakarta mengalami penurunan.

**Tabel 1.2**

NO	KABUPATEN/KOTA	DANA ALOKASI UMUM (DAU) (Ribuan Rupiah)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	BOYOLALI	641.483.262	780.301.856	871.685.981	943.220.456	968.089.632
2	KARANGANYAR	577.562.945	720.918.512	810.216.582	870.001.752	906.446.527
3	KLATEN	793.292.770	967.284.829	1.060.318.427	1.142.586.588	1.164.196.398
4	SRAGEN	618.442.630	778.668.035	869.155.545	946.826.641	977.443.589
5	SUKOHARJO	564.840.146	680.235.009	763.462.900	826.891.481	854.457.636
6	SURAKARTA	473.888.738	595.222.827	659.647.382	710.803.934	713.300.856
7	WONOGIRI	682.033.161	828.479.528	917.476.557	1.001.378.439	1.031.393.472

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2011-2015

Dapat dilihat tabel diatas adalah pergerakan atau perkembangan dari jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) di Eks-Karisidenan Surakarta yang dominan naik tidak ada penurunan selama tahun 2011 hingga 2015.



**Tabel 1.3**

NO	KABUPATEN/KOTA	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) (Ribu Rupiah)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	BOYOLALI	67.160.700	60.360.690	59.233.500	81.095.720	68.322.720
2	KARANGANYAR	58.185.600	55.514.410	55.203.062	57.238.710	57.993.170
3	KLATEN	80.954.100	74.501.530	61.175.420	66.576.420	54.263.970
4	SRAGEN	49.163.800	69.378.280	61.857.560	76.469.300	72.521.700
5	SUKOHARJO	49.172.300	47.616.310	53.124.680	56.904.480	53.871.130
6	SURAKARTA	34.895.100	28.972.180	32.893.036	43.848.110	3.750.100
7	WONOGIRI	77.831.700	75.052.100	75.705.890	59.392.120	83.152.970

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2011-2015

Berbeda halnya dengan perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terlihat adanya ke tidak stabilan dengan tahun-tahun sebelumnya. Terlihat bahwa setiap tahun nilai dari Dana Alokasi Khusus (PAD) mengalami naik turun.

**Tabel 1.4**

NO	KABUPATEN/KOTA	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	BOYOLALI	15.561.176	16.980.608	18.798.639	20.958.574	23.495.135
2	KARANGANYAR	18.757.479	20.798.594	22.880.345	25.645.062	28.033.945
3	KLATEN	19.372.039	21.348.292	23.349.880	26.110.764	29.117.331
4	SRAGEN	18.103.684	19.887.565	21.870.689	24.488.923	27.264.849
5	SUKOHARJO	18.394.170	20.228.720	22.029.890	24.260.290	26.614.131
6	SURAKARTA	23.909.011	26.425.273	29.092.454	32.038.669	34.982.374
7	WONOGIRI	14.506.500	16.024.057	17.657.526	19.674.351	21.499.657

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2011-2015

**Tabel 1.5**

NO	KABUPATEN/KOTA	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	BOYOLALI	14,592,026	15,369,974	16,265,749	17,085,662	18,189,698
2	KARANGANYAR	17,205,064	18,189,077	19,224,636	20,208,968	21,360,144
3	KLATEN	18,071,351	19,102,403	20,299,991	21,391,718	22,622,660
4	SRAGEN	16,870,231	17,902,105	19,102,982	20,170,943	21,396,758
5	SUKOHARJO	17,319,639	18,342,247	19,403,139	20,423,512	21,555,551
6	SURAKARTA	22,848,439	24,123,782	25,612,681	26,955,056	28,453,494
7	WONOGIRI	13,786,711	14,605,088	15,305,298	16,109,708	16,975,074

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2011-2015

Dilihat berdasarkan dua tabel diatas pertumbuhan ekonomi di Eks-Karisidenan Surakarta cenderung naik setiap tahunnya. Tentu saja ini adalah suatu bukti bahwa berkembangnya perekonomian di daerah-daerah tersebut.

Dalam mengukur pertumbuhan ekonomi kita juga harus memperhatikan indikator-indikatornya diantaranya terdiri dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi daerah, sedangkan faktor – faktor yang mempengaruhinya antara lain : angkatan kerja, investasi, dan pengeluaran pemerintah daerah. Adapun indikator lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah antara lain kesejahteraan penduduk dan tenaga kerja dan pengangguran.

Bagi Daerah yang memiliki banyak potensi, termasuk potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia, tentu ini akan menghasilkan PAD yang tinggi tanpa ditambah dengan DAU dan DAK dari pemerintah pusat. Pembangunan di daerah ini akan berjalan dengan baik apabila untuk memenuhi kebutuhan pembangunan ditambah dengan DAU dan DAK dari Pemerintah Pusat. Otomatis pertumbuhan ekonomi dai daerah ini akan tinggi.

Sedangkan untuk daerah dengan potensi sumber daya rendah ini tentu akan menyulitkan untuk memperoleh hasil pembangunan yang maksimal. Ini dikarenakan hasil PAD pada daerah ini tidak memadai untuk mengadakan pembangunan. Jadi daerah ini mengandalkan bantuan DAU dan DAK dari Pemerintah Pusat. Tentu saja dengan keadaan yang seperti ini akan di peroleh pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah.

Untuk daerah Eks-Karisidenan Surakarta (Boyolali, Karanganyar, Klaten, Sragen, Sukoharjo, Surakarta dan Wonogiri) memiliki potensi berbeda beda untuk mempengaruhi jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) , apabila dana tersebut digunakan sesuai dengan

tujuan dan tepat sasaran maka akan dapat membantu pertumbuhan ekonomi di daerah Eks-Karisidenan Surakarta.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi terkait dengan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Oleh karena itu penulis mengambil judul “ Pengaruh Pendapatan Asli Daerah PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Eks-Karesidenan Surakarta Tahun 2011 – 2012“.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Eks-Karisidenan Surakarta ?
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Eks-Karisidenan Surakarta ?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Eks-Karisidenan Surakarta ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk menganalisis adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi di Eks-Karisidenan Surakarta periode 2011-2015.
2. Untuk menganalisis adanya pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pertumbuhan ekonomi di Eks-Karisidenan Surakarta periode 2011-2015.

3. Untuk menganalisis adanya pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi di Eks-Karisidenan Surakarta periode 2011-2015.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi pemerintah penelitian ini diharapkan mampu memberi bahan masukan bagi pemerintah dalam proses perencanaan, evaluasi anggaran dan pendapatan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Eks-Karisidenan Surakarta.
2. Bagi tiap-tiap Kabupaten, penulisan skripsi ini dapat digunakan sebagai analisis dari besarnya pengaruh atau kontribusi riil yang diberikan oleh Realisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah), Dana Alokasi Umum ( DAK) dan Dana Alokasi Khusus ( DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) di wilayah Eks-Karisidenan Surakarta.
3. Bagi masyarakat, penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan tentang sumber-sumber penerimaan Pemerintah Daerah serta sejauh mana faktor-faktor lain dapat mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi .
4. Bagi penulis, penulisan skripsi ini adalah upaya untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana di bidang Ilmu Ekonomi tempat saya menuntut ilmu perkuliahan.
5. Dan Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

## E. Metode Penelitian

### 1. Data dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan jenis data deret berkala (time series) dari tahun 2011-2015 di Kabupaten dan Kota Se Eks Karisidenan Surakarta. Pembahasan Mengacu pada data-data yang diperoleh dari BPS dan sumber-sumber pemerintah lainnya. Selanjutnya digunakan beberapa metode analisis data untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

### 2. Model dan Alat Analisis

Model dan analisis dalam penelitian ini menggunakan statistik linier berganda (Multiple Regression) untuk data panel. Teknik ini digunakan dengan tujuan untuk menguji hipotesis penelitian yang telah disebutkan . Model regresi data panel ini menggunakan variabel dependen Pertumbuhan Ekonomi (Y), sedangkan variabel independennya adalah Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), Dana Alokasi Khusus (X3). Apabila ditulis dalam suatu fungsi matematis, maka formula regresi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = f ( X1, X2, X3)$$

Berdasarkan variabel-variabel yang dijelaskan peneliti sebelumnya maka perumusan model yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \beta_1 + \beta_2 X_{1it} + \beta_3 X_{2it} + \beta_4 X_{3it} + \mu_{it}$$

Keterangan:

Y = Pertumbuhan Ekonomi

$\beta_1$  = Konstanta

$\beta_2$  = Koefisien Pendapatan Asli Daerah (PAD)

$\beta_3$  = Koefisien Dana Alokasi Umum (DAU)

$\beta_4$  = Koefisien Dana Alokasi Khusus (DAK)

$X_1$  = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

$X_2$  = Dana Alokasi Umum (DAU)

$X_3$  = Dana Alokasi Khusus (DAK)

$i$  = Kabupaten/Kota ke-1 (1,2,...7)

$t$  = Tahun Pengamatan (2011,...2015)

$\mu_{it}$  = error

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini menjelaskan tentang beberapa teori-teori. Teori-teori tersebut mencakup pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pertumbuhan ekonomi. Pada bagian akhir bab ini juga terdapat penelitian terdahulu yang menghasilkan kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian serta definisi operasionalnya, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data untuk mencapai tujuan penelitian.

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini hasil penelitian yang mencakup gambaran umum tentang obyek penelitian, serta hasil pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah yang di bahas. Penulis juga melakukan analisis data untuk mencapai tujuan penelitian.

### BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan dari hasil penelitian. Sedangkan saran merupakan masukan peneliti selanjutnya.

### LAMPIRAN